



**LAPORAN PERJALANAN
DINAS
DISKUSI PERCEPATAN
PELAKSANAAN RENCANA
AKSI REFORMASI
BIROKRASI**

2021

**LAPORAN
PERJALANAN
DINAS**

MEMORANDUM

Kepada Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Dari : Penanggung jawab Kegiatan Subkelompok Aplikasi Sistem Informasi
Perihal : Laporan Perjalanan dalam rangka Diskusi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Tanggal : 16-17 Februari 2021

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan hasil kegiatan dalam rangka Diskusi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan pada tanggal 16-17 Februari 2021.

Petugas yang melaksanakan kegiatan :

No	Nama	Jabatan	NIP
1	Asyhadi Laksono Hakim, S Kom.MT	Pranata Komputer	19870104 201101 1 010

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I. DASAR HUKUM

Surat Perintah Tugas Nomor : 52/ST/PSI/KU.140/A.8/02/2021

II. SUMBER DANA

Kegiatan ini didanai dari anggaran :

Program	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pertanian
Kegiatan (1751)	: Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian
Output (1751.963)	: Layanan Data dan Informasi
Sub Output (1751.963.101)	: Layanan Data Statistik dan Sistem Informasi Pertanian
Komponen (051)	: Manajemen Sistem Informasi
Sub Komponen (B)	: Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
Jenis Belanja (akun) 524119	: Belanja Perjalanan Biasa

III. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16-17 Februari 2021

IV. LOKASI

Hotel Royal Bogor, Jalan Ir. H. Juanda No.16 Paledang, Bogor Tengah, Jawa Barat

V. TUJUAN KEGIATAN

Diskusi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

VI. HASIL KEGIATAN

Telah dilakukan perjalanan dinas oleh fungsional ke hotel royal Bogor, dalam rangka Diskusi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Hasil Perjalanan

1. Rencana Aksi RB Kementan:
 - a. Sosialisasi RB
 - b. Penetapan Rencana aksi RB Kementan

- c. Evaluasi rencan aksi RB
 - d. Pengawalan/monitoring pelaksanaan RB
 - e. Menyusun perkembangan RB per triwulan dan FGD tim RB kementan
 - f. Penyusunan LKE RB
2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian pada tahun 2019 adalah 79,05 dengan kategori BB, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 78,46
 3. Pada beberapa unit kerja pelaksanaan RB masih terbatas pada anggapan untuk kewajiban pemenuhan dokumen dan belum menjadi kebutuhan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, hal ini berakibat perubahan pola pikir dan budaya kinerja pada setiap pegawai di lingkungan Kementan yang merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum terlihat secara merata
 4. Rencana aksi yang disusun juga belum sepenuhnya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan juga belum menetapkan hasil yang ingin dicapai, sehingga rencana aksi yang ada masih berupa pelaksanaan kegiatan saja dan belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan yang ada dalam mencapai hasil yang diinginkan
 5. Keterlibatan pimpinan di beberapa unit kerja belum sepenuhnya mendorong perubahan yang signifikan dalam mengimplementasikan pelaksanaan RB hingga unit terkecil yang berada di dalam unit kerja tersebut
 6. Kementerian Pertanian telah melakukan pengukuran terhadap perubahan budaya organisasinya, namun hasil pengukuran budaya organisasi yang dilakukan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh sebagian unit kerja dalam melihat seberapa jauh keberhasilan internalisasi budaya organisasi yang telah diterapkan
 7. Agen perubahan telah dibentuk baik di level pusat maupun di unit kerja, namun belum seluruh agen perubahan memiliki rencana aksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Pemilihan agen perubahan belum didasarkan pada seleksi terbuka, serta monitoring rencana aksi agen perubahan yang dilakukan belum secara intensif dan memberikan umpan balik terkait hasil perubahan yang diberikan oleh agen perubahan. Oleh karena itu, dampak hasil dari perubahan yang diwujudkan belum dapat diukur untuk mendorong perubahan nyata diunit kerjanya.
 8. Kementan telah menyusun Road Map RB 2020-2024 yang telah, namun perlu diperjelas mengenai arah dan sasaran perubahan yang ingin diwujudkan. Selain itu, diharapkan agar setiap unit kerja (tingkat eselon 1) untuk ikut terlibat dalam

membuat Quick Wins yang telah disusun, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian Quick Wins di tahun berjalan.

9. Dalam mengukur pencapaian kinerja pegawai hingga ke level daerah, Kementan telah membangun sistem pengukuran kinerja (E-kinerja) guna mengukur seluruh kinerja pegawai di seluruh satker Kementan.
10. Kementerian pertanian telah mulai melakukan penyaringan terkait manajemen talenta dilingkungan pusat untuk mendukung manajemen SDM yang lebih baik
11. Penerapan manajemen SDM berbasis kinerja belum sepenuhnya berhasil diterapkan oleh Kementan. Di level unit kerja di daerah, Perjanjian kinerja yang dimiliki oleh staf masih berupa uraian kegiatan dan belum menggambarkan secara detail kontribusi pegawai terhadap pencapaian unit kerja
12. Belum seluruhnya pimpinan unit kerja, terutama pada unit kerja di daerah, memberikan umpan balik berupa informasi terkait hal yang sudah baik maupun perlu ditingkatkan oleh pegawai dalam mendukung kontribusi pencapaian kinerja di setiap unit kerjanya
13. Perencanaan kebutuhan pegawai per tahun belum dikaitkan dengan rencana kinerja per tahun sehingga kemungkinan terjadinya bias dalam perencanaan kebutuhan pegawai.
14. Pengembangan pegawai yang berorientasi kepada peningkatan kompetensi belum sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang diolah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.
15. Kepatuhan LHKPN Kementan berdasarkan data yang didapatkan pada saat evaluasi adalah 96%
16. Peta resiko yang ada pada sebagian besar unit kerja masih belum menggambarkan risiko yang sesuai dengan proses kegiatan dalam mewujudkan kinerja. Hal tersebut mengindikasikan Pengendalian internal masih perlu ditingkatkan
17. Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2020 telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan berhasil menambah 7 unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan 1 unit kerja WBBM.
18. Unit kerja yang belum berhasil mendapat predikat WBK/WBBM pada umumnya belum memahami definisi maupun target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Selain itu, Kurang optimalnya sebagian unit kerja untuk membangun kedekatan (*intimacy*) dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja tersebut belum mendapat tanggapan positif dan hal ini tercermin dari hasil survei eksternal beberapa unit kerja yang tidak menggembirakan.

19. Kementan memiliki berbagai macam inovasi yang menunjang pencapaian kinerja baik level kementerian maupun setiap unit kerja hingga unit kerja di daerah. Salah satunya adalah IQFAST yang dimiliki oleh Barantan yang memperoleh Top 45 Sinovik 2020
20. Pada unit pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagian sistem pelayanan tersebut belum terintegrasi dengan sistem manajemen unit kerja yang lebih tinggi secara berjenjang sampai level instansi, sehingga pemantauan hasil dan transparansi pelayanan belum sepenuhnya efektif.
21. Kementan sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala namun belum seluruh hasil survey ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan sesuai harapan stakeholder dan untuk perbaikan layanan yang telah dilakukan belum diinformasikan secara masif keseluruh stakeholder, sehingga sebagian stakeholder belum sepenuhnya meyakini perubahan pelayanan Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN

Surat Tugas

		KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN			
<small>GO. D LANTAI IV - JL. HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN - JAKARTA SELATAN 12550 TELEPON : (021) 7822638, 7818384, FAKSIMILE (021) 7822638, 7818385 HOMEPAGE : http://www.pertanian.go.id - Email : pustadin@pertanian.go.id</small>					
SURAT TUGAS					
Nomor : 52 /ST/PSIKU.140/A8/02/2021					
Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian pasal 1159 yang menyatakan bahwa Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis dan pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.					
Dasar :					
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor SP DIPA-018.01.1.411925/2020 tanggal 12 November 2019					
2. SK Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nomor: 1231/Kpts/KU.110/A8/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian TA.2020;					
3. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan 2020 tanggal 17 Mei 2019;					
4. Surat Undangan B.467/TU.020/A2/02/2021 tentang Forum Diskusi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi					
Memberi Tugas					
Kepada :					
NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	
1	Asyhadi Laksono Hakim, S.Kom, M.T	198701042011011010	III.b	Pranata Komputer Pertama	
Untuk : Melaksanakan kegiatan perjalanan dinas, dengan uraian sebagai berikut:					
1.	Dalam rangka	: Diskusi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi			
2.	Tujuan	: Hotel Royal Bogor, Jalan Ir. H. Juanda No 16 Paledang, Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat			
3.	Tanggal/Pukul	: Selasa / 16 Februari 2021			
4.	Alat Angkut yang digunakan	: Kendaraan Umum			
5.	Sumber Dana	: DIPA Pusdatin			
 Jakarta, 16 Februari 2021 Koordinator SubKelompok Aplikasi Sistem Informasi					
					
Aryo Wicaksono, S. KOM. MM NIP. 197007051996031002					

Nota Dinas:



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

GD. D LANTAI IV - JL. HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN - JAKARTA SELATAN 12955

TELEPON : (021) 7922636, 7916384, FAKSIMILE (021) 7922636, 7916385

HOME PAGE : <http://www.pertanian.go.id> - Email : pusdatin@pertanian.go.id



NOTA DINAS

Nomor: 52 /TU.040/A8/02/2020

Kepada Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Dari : Penanggungjawab Umum/ Penanggungjawab Kegiatan

Mohon persetujuan untuk melaksanakan kegiatan **Perjalanan Dinas Biasa*)** dengan menggunakan anggaran pada :

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
Output (4577.EAJ) : Layanan Data dan Informasi
Sub Output (4577.EAJ.001) : Layanan Sistem Informasi
Komponen (054) : Pengawasan Aplikasi Sistem Informasi
Sub Komponen (A) : Integrasi Layanan Aplikasi Sistem Informasi
Jenis Belanja (524111) : Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tgl : Selasa-Rabu/16-17 Februari 2021
Jumlah hari : 2 (dua) hari
Tempat tujuan : Hotel Royal Bogor
Dalam rangka : Tindaklanjut Reformasi Birokrasi

Petugas yang akan melaksanakan kegiatan :

Nama	NIP	Jabatan
Asyhadi Laksono Hakim, S.Kom, M.Si	198701042011011010	Pranata Komputer

Jakarta, 16 Februari 2021

Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Eko Nugroho, S.Kom, MM
NIP. 19710911 199803 1 002

Yang Mengajukan
Penanggung Jawab Umum

Ir. Bayu Mulyana, MM
NIP. 19660525 199203 1 002

Surat Undangan:



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B.467/TU.020/A2/02/2021 10 Februari 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Forum Diskusi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2021

Yth.
(mohon lihat lampiran)
di Tempat

Dalam rangka percepatan program reformasi birokrasi dan penguatan komitmen tim reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, diperlukan forum diskusi percepatan pelaksanaan rencana aksi guna memfokuskan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan Saudara untuk hadir dan/atau menugaskan pejabat yang membidangi fungsi reformasi birokrasi dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa-Rabu, 16-17 Februari 2021 (jadwal terlampir)
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Hotel Royal Bogor
Jl. Ir. H. Juanda No.16, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi, seluruh tim kerja di unit kerja Eselon I diharapkan dapat menyiapkan rancangan rencana aksi reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerjanya.

Sebagai informasi, kegiatan akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19. Konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdr. Drs. Nanang Suryana, M.M. (Analisis Kepeg. Ahli Madya) HP/WA 08129091612.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian

Drs. Zulkifli, M.M
NIP. 196912021994031002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

JADWAL ACARA
FORUM DISKUSI PERCEPATAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021
BOGOR, 16 FEBRUARI 2021

Selasa, 16 Februari 2021		
09.30	Registrasi Peserta	Panitia
09.30 – 10.00	Pembukaan dan Paparan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
10.00 – 10.15	Coffee Break	
10.15 – 11.45	Kebijakan Rumusan Reformasi Birokrasi nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
11.45 – 12.00	Diskusi	Moderator
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.30	Analisis masukan dan perbaikan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi PMPRB lingkup Unit Kerja Eselon I	Sekretaris Inspektorat Jenderal
15.30 – 16.00	Coffee Break	
16.00 – 17.00	1. Sosialisasi rencana aksi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. 2. Sosialisasi Pelaksanaan Kepmentan 39 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Kerja Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Koordinator Pokja RB Kementerian Pertanian
17.00 – 18.00	Diskusi	Moderator
18.00	Penutup	Panitia

Rabu, 17 Februari 2021		
09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 – 09.45	Strategi Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi lingkup: 1. Inspektorat Jenderal 2. Ditjen Tanaman Pangan 3. Ditjen Perkebunan 4. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tim Pokja RB Unit Kerja Eselon I
09.45 – 10.00	Coffee Break	
10.00 – 10.45	Strategi Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi lingkup: 1. Ditjen Hortikultura 2. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 3. Badan Litbang Pertanian 4. BPPSDMP	Tim Pokja RB Unit Kerja Eselon I
10.45 – 11.30	Strategi Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi lingkup: 1. Badan Ketahanan Pangan 2. Badan Karantina Pertanian	Tim Pokja RB Unit Kerja Eselon I
11.30 – 12.00	Diskusi	Panitia
12.00	Penutupan	Panitia

Dokumentasi Foto Kegiatan:





